

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku:

- Abdulkadir Muhammad. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia* (Cet. 5). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Artha Windari, R. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Arrasjid, C. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badruzaman, M. D. (n.d.). *Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawi, H. (2006). *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Kharisma Bumi Aksara.
- Emeritus, L., Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2012). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Fikahati Aneska.
- Fauzi, W. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press.
- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Busamedis.
- Harjono, D. K. (2008). *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: PPHBI.
- Hartono, S. R. (2001). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O. C. (2013). *Kontrak Bisnis: Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Cet. 2). Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, M. (2008). *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Pusat Informasi Perkoperasian.
- Pandia, F., et al. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Cet. 1). Jakarta: Rineka Cipta.
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

- Prawoto, A. (1995). *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi* (Cet. 2). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (Cet. Kedelapan). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rianto, N. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ridwan, H. J., & Sudrajat, A. S. (2010). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Cetakan 1). Bandung: Nuansa.
- Saliman, A. R. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Silvanita, K., & Silvanita, M. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. 7). Jakarta: Kencana.
- Subhi, A. M. (2001). *Filsafat Etika*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- II. Jurnal:
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148-163.
- Badruzaman, D. (2019). Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1).
- Guntara, D. (2016). Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya. *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, 1(1).
- Husain, F. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Lex Crimen*, V(6).
- Nurjihad. (2022). Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(1), 1-.
- Sukoco, J. B. (2020). Analisis Kepedulian Masyarakat Terhadap Asuransi Sebagai Mitigasi Resiko Dalam Perlindungan Aset. *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayanan Nasional*, 3(2).

III. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan(OJK).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 1999 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha perasuransian

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.

POJK RI Nomor 39/POJK.05/2020 Tentang perubahan kedua atas peraturan OJK No 14/POJK 05/1995 Tentang Retensi sendiri dan dukungan Reasuransi dalam negeri.

POJK Nomor 73/POJK 05/2016 Tentang tata Kelola perusahaan Asuransi Jiwa yang baik bagi perusahaan.

POJK Nomor 72/POJK 05/2016 Tentang Kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip Syariah

POJK Nomor 71/POJK 05/2016 Tentang Kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

POJK Nomor 70/POJK 05/2016 Tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

POJK Nomor 63/POJK 05/2016 Tentang perubahan atas peraturan OJK Nomor 11/OJK/05/2016 Tentang pemeriksa langsung Lembaga Keuangan Non Bank.

POJK Nomor 1/POJK 05/2016 Tentang investasi surat berharga negara bagi Lembaga jasa keuangan non bank.

IV. Internet:

Agustinus Rangga. (2023, 15 Februari). Daftar Kasus Asuransi Gagal Bayar dengan Nilai Fantastis di Indonesia. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2023/02/15/203600326/daftar-kasus-asuransi-gagal-bayar-dengan-nilai-fantastis-di-indonesia?page=all>

Ari Suryanto. (2022, 9 Desember). Puluhan Korban Gagal Bayar Bumiputera Ngadu ke Polda Lampung. Diakses dari <https://radarlampung.disway.id/read/205641/puluhan-korban-gagal-bayar-bumiputera-ngadu-ke-polda-lampung>

Arjuna. (2022, 10 Desember). Demo Kantor OJK Kepri, Korban Asuransi Bumiputera: Di Kepri Gagal Bayar Rp 77 Miliar. Diakses dari <https://www.batamnews.co.id/berita-82885-demo-kantor-ojk-kepri-korban-asuransi-bumiputera-di-kepri-gagal-bayar-rp-77-miliar.html>

Denis Riantiza Meilanova. (2023, 11 Februari). Eks Direksi Bumiputera Tulis Surat Terbuka kepada OJK, Ini Isinya. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20220211/215/1499549/eks-direksi-bumiputera-tulis-surat-terbuka-kepada-ojk-ini-isinya>

Fien. (2022, 12 Desember). Nasabah Kasus Gagal Bayar Asuransi Bumiputera Bakal Gelar Aksi Damai 23-25 Mei 2022. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4963490/nasabah-kasus-gagal-bayar-asuransi-bumiputera-bakal-gelar-aksi-damai-23-25-mei-2022>

Rustam Agus. (2023, 20 Februari). AJB Bumiputera 1912 Masuk Pengawasan Khusus OJK. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20140618/215/237069/ajb-bumiputera-1912-masuk-pengawasan-khusus-ojk>